

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat penting di Indonesia yang mempunyai peran bagi kelangsungan kehidupan perekonomian Indonesia. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito setelah itu menyalurkan dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kemudian bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, mentransfer uang, dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari uang sekolah, uang kuliah, pembayaran listrik, telepon, dan lainnya.

Bank sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena, aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya peraturan Bank Indonesia.

Berdasarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diterbitkan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Fungsi utama perbankan adalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Kredit pada umumnya muncul karena manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan untuk menghasilkan barang dan jasa, agar dapat bisa memenuhi kebutuhannya. Maka manusia perlu mendapatkan pinjaman (kredit) dari pihak orang lain maupun dari lembaga keuangan seperti bank. Dalam penyaluran kredit bank akan menghadapi beberapa situasi seperti jika debitur tidak membayar kewajibannya tepat pada waktunya, debitur akan menghilang dan sebagainya. Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit.

Sebelum debitur memperoleh kredit dari pihak bank terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan penilaian yaitu mulai dari permohonan calon debitur, penelitian data dibagian kredit, memeriksa kelengkapan data, wawancara, tinjauan langsung kelapangan, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, tahapan-tahapan dalam memberikan kredit ini di sebut sebagai prosedur pemberian kredit. Tujuan pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan

suatu kredit diterima atau ditolak. Apabila kreditur tidak dapat melakukan pengembalian pinjaman kredit yang dilakukan maka muncul *Non Performing Loan* (PLN) atau kredit bermasalah pada laporan keuangan.

Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam untuk melaksanakan kembali dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungan (Cahyono, 2010:21).

Sedangkan menurut Amanda(2015:2) Kredit merupakan sumber utama penghasilan bagi bank yang sekaligus sumber operasi terbesar, sebagian besar dana operasional diputar dalam bentuk Kredit. Jika kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun akan berhasil, namun jika bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal itu akan berpengaruh besar bagi operasional bank tersebut.

Kebijakan KUR baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 maret 2007 yang bertempat di Kantor Kementrian Negara Koprasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang waktu itu masih dipimpin Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang bisa diambil adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koprasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan Koprasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas perusahaan pinjaman. Kredit Usaha Rakyat (KUR) digambarkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 Tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR tersebut, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM juga ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas pinjaman terhadap KUR. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka dari itu pihak bank selektif dalam memberikan kredit kepada debitur, dimana sebelum memberikan kredit kepada debitur maka pihak bank harus menganalisis pemberian kredit untuk menentukan kesanggupan kepada debitur untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh

karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur dan proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang akan timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan sangat berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan tujuan pemerintahan atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi untuk mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja (Wijaya, 2019:7).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah skema kredit atau pembiayaan kerja yang khusus diperuntukkan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas pinjaman untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan (Widiastuti, 2019:104). KUR merupakan program yang termasuk dalam kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil guna meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

Di dalam pemberian kredit terdapat dua belah pihak yang langsung berkaitan. Yang pertama pihak pemberi kredit (*reditor*) yaitu pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang kedua pihak penerima kredit (*kreditor*) yaitu yang membutuhkan dana. Tujuan pokok dari pemberian kredit oleh suatu bank untuk meningkatkan aktivitas ekonomi kegiatan perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, turut mensukseskan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan, memperoleh laba agar kelangsungan hidup bank dapat terjamin mengingat pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank dan penghasilan pokok bank.

“Pihak bank sebagai kreditor yang memberikan kredit, terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan 5C yaitu *Character* (sifat atau watak calon debitur), *Chapacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisis), dan *Collateral* (jaminan). Kemudian Selain itu kreditor juga harus memperhatikan aspek-aspek pertimbangan kredit yaitu menilai kelayakan usaha yang dibiayai tersebut, meliputi aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek hukum, aspek teknik operasional” (Kasmir, 2007:104).

Sistem yang tepat merupakan hal yang diperlukan pada saat penyaluran kredit kepada debitur. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. “menurut Mulyadi (2016:3), sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Oleh karena itu, masyarakat perlu mengetahui mengenai program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebelum mengajukan permohonan kredit. Pengajuan permohonan kredit harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan dengan mengetahui dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kemudian, untuk dapat bisa menjalankan aktivitas perusahaan tersebut perusahaan membutuhkan suatu sistem. Dengan adanya sistem diharapkan akan memberikan suatu jaringan prosedur dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti sistem dan prosedur pemberian kredit yang diberlakukan pada tempat magang penulis apakah sistem yang digunakan sudah berjalan secara optimal sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul Tugas Akhir “**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BRI UNIT TRIMULYO CABANG TANUNG KARANG**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT. Bank BRI unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang ?
2. Apa saja kelemahan dan kelebihan sistem yang digunakan tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada PT. Bank BRI unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

2. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan penerapan sistem pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank BRI unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang diperoleh yaitu :

1. Bagi peneliti, untuk memenuhi syarat memperoleh gelar diploma III Keuangan & Perbankan pada fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro.
2. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan sistem dan prosedur pemberian kredit.
3. Sebagai pihak lain, dapat memberikan informasi yang dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan para pemakai informasi lain seperti mahasiswa-mahasiswa Perbankan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan proposal tugas akhir analisis sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat bank BRI unit Trimulyo cabang Tanjung Karang, Penulis akan mengemukakan secara singkat mengenai sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 5 BAB yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian serta kegunaan penelitian yaitu terkait dengan analisis sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat Bank BRI Unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Dalam kajian teoritik ini membahas terkait segala aspek-aspek yang ada dalam sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat di Bank BRI Unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Mencakup waktu, lokasi, dan metode penelitian pengumpulan data selama proposal dibuat.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang pengolahan Data dan pembahasan pada PT. Bank BRI Unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pengolahan dan pembahasan Analisis sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat di Bank BRI Unit Trimulyo Cabang Tanjung Karang.

DAFTAR PUSTAKA